

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Submitted: 2 Desember 2019 | Accepted: 26 Februari 2020 | Published: 9 Maret 2020 |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani

Paulus S. Widjaja

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana

pauluswidjaja@staff.ukdw.ac.id

Abstract

Pancasila is a minimal morality, reiteration of maximal moralities lived by various religious groups in Indonesia. As minimal morality, Pancasila is needed for social solidarity and criticism in the public sphere. Hence all religious groups in Indonesia, including Christians, need to continuously actualize the historical essence of the principles of Pancasila from the faith perspective of the respected religious group. This writing intends to demonstrate the actualization of the principles of Pancasila from the perspective of Virtues Ethics. Through this study it can be concluded that the essence of the Pancasila is not something apart from what Christians believe and live. Pancasila has its resonance in specific Christian virtues of hope, vulnerability, humility, forbearance, and empathy.

Keywords: *Pancasila; virtue; hope; vulnerability; humility; forbearance; empathy*

Abstrak

Pancasila adalah moralitas minimal yang merupakan reiterasi dari berbagai moralitas maksimal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda di Indonesia. Sebagai moralitas minimal, Pancasila dibutuhkan untuk solidaritas sosial dan kritik sosial di ruang publik. Oleh karena itu semua kelompok umat beragama di Indonesia, termasuk orang-orang Kristen, perlu terus menerus mengaktualisasikan esensi historis sila-sila Pancasila dari perspektif iman masing-masing. Tulisan ini bermaksud menunjukkan aktualisasi sila-sila Pancasila dari sudut pandang Etika Kebajikan. Melalui kajian ini dapat disimpulkan esensi sila-sila Pancasila bukanlah sesuatu yang asing dari apa yang diyakini serta dihidupi orang-orang Kristen. Sila-sila Pancasila mendapatkan resonansinya dalam kebajikan-kebajikan Kristiani yang spesifik, yaitu pengharapan, kerentanan, kerendahan hati, kesabaran sepenanggungan, dan empati.

Kata Kunci: Pancasila; kebajikan; pengharapan; kerentanan; kerendahan hati; kesabaran; empati

PENDAHULUAN

Presiden Jokowi pernah menyampaikan sebuah *tag line* dalam pidatonya saat merayakan Hari Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017 yang kemudian menjadi viral, “Saya Indonesia, Saya Pancasila.” *Tag line* ini lahir dari keprihatinan yang mendalam tentang kondisi sosial bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini tercabik-cabik. Di sebagian wilayah Indonesia, orang-orang terlibat kembali dalam konflik berbasis identitas. SARA yang di masa lalu sempat mengancam keutuhan bangsa Indonesia kembali menyeruak ke permukaan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di paruh pertama tahun 2017 yang berlangsung amat sengit dan membawa-bawa politik identitas adalah kenyataan pahit tentang primordialisme sempit yang mengakuisisi ruang publik. Pun demikian dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di mana politik identitas digoreng habis-habisan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan pihak yang tidak sejalan dengan dirinya dan kelompoknya. Lebih berbahaya lagi karena masyarakat Indonesia kini terjerat dalam apa yang oleh Aulia Nastiti and Sari Ratri disebut sebagai

emotive politics, yaitu upaya memobilisasi massa oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk tujuan politik, dengan menggunakan isu-isu emosional, seperti larangan memilih pemimpin publik yang tidak seagama, penolakan mensholatkan jasad orang yang dianggap berseberangan dalam pilihan politik, atau isu kriminalisasi pemuka agama.¹

Di tengah hiruk pikuk semacam ini, di mana posisi orang-orang Kristen? Percakapan tentang Pancasila oleh orang-orang Kristen seringkali terjadi sangat terlambat, bahkan tidak jarang terkesan latah. Hal ini patut disayangkan karena sudah semestinya jika orang-orang Kristen, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ikut serta melakukan aktualisasi ideologi Pancasila. Ideologi adalah “kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.”² Orang-orang Kristen perlu terus menerus merenungkan bagaimana seharusnya kita menyikapi ideologi Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih

¹ Aulia Nastiti and Sari Ratri, “Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia*, ISEAS @ 50 Special Issue: Young Scholars in Southeast Asian Studies, 40, no. 2 (August 2018): 196–221.

² Rizal Mustansyir, “Pancasila Sebagai Sumber Kecerdasan Ideologis Bangsa Indonesia” (Menara Ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat UGM, 2015), https://drive.google.com/file/d/0B5oYZGP7oYzjb05xNjhaSDVyWW8/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.

spesifik lagi, sebagai orang-orang Kristen kita perlu bertanya bisakah kita menghayati dan mengamalkan Pancasila berlandaskan pada Etika Kebajikan (*virtue ethics*) yang menekankan pada penyemaian dan penumbuhan-kembangan kebajikan-kebajikan Kristiani tertentu yang selaras dengan esensi historis sila-sila Pancasila? Itulah pertanyaan yang ingin dijawab melalui tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dilandaskan pada studi kepustakaan untuk menganalisis tulisan-tulisan yang sudah pernah ditulis, baik oleh pakar Filsafat, pakar Sosiologi Politik, maupun pakar Agama, yang mencoba memaknai Pancasila dari sudut pandang Etika Kebajikan, atau kadang disebut juga sebagai Etika Keutamaan³ atau Etika Karakter.⁴

Etika Kebajikan adalah etika yang memberi perhatian pada disposisi, kecenderungan tetap, yang ada dalam diri manusia, yang membuatnya melakukan tindakan A dan bukannya B. Disposisi semacam itu bukanlah sesuatu yang dibawa oleh seseorang sejak lahir, melainkan sesuatu yang dengan sengaja disemai, ditumbuh-kembangkan, dan dilatih melalui kebiasaan (*habit*) dan praktik-praktik sosial (*social practices*) hingga pada akhirnya menjadi

kebajikan. Kebajikan (*areté*) adalah sebuah kombinasi antara daya (*power*) dan kesempurnaan (*excellence*). *Areté* sebuah jam tangan, misalnya, adalah daya yang membuat jam tangan tersebut senantiasa menunjukkan waktu secara akurat. *Areté* seorang pengampun adalah kemampuannya untuk mengampuni orang-orang lain, bahkan musuh-musuhnya.⁵ Demikian pula halnya dengan manusia Pancasila. *Areté* manusia Pancasila adalah kemampuannya untuk menghayati dan mengamalkan esensi historis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara konsisten dan sempurna.

Hastanti Widy Nugroho, dosen Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari perspektif fenomena moral yang memberi perhatian pada esensi, forma, dan ekspresi. Menurutnya, sebuah tindakan moral hanya bisa dikatakan baik jika memenuhi ketiga elemen tersebut. Dalam terang ini Nugroho menunjukkan bahwa berbeda dari berbagai macam aliran filsafat moral seperti hedonisme, eudomonisme, utilitarianisme, maupun deontologi, maka Etika Keutamaan mempunyai kelebihan. Etika Keutamaan memerhatikan bukan hanya bagaimana sebuah tindakan bisa sesuai dengan norma moral yang ada

³ William Chang, *Menggali Butir-Butir Keutamaan* (Penerbit Kanisius, 2002).

⁴ Paulus S. Widjaja, *Character Formation and Social Transformation: An Appeal to The Indonesian*

Churches Amidst the So-Called Chinese Problem (Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010).

⁵ Widjaja, Chapter Three.

dalam masyarakat, tapi juga bagaimana tindakan tersebut lahir dari sebuah karakter yang secara esensial ada dalam diri si agen moral. Dalam kaitan dengan itulah maka Pancasila patut diapresiasi, karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mencerminkan karakter asli bangsa Indonesia. Kita bisa mengklaim bahwa bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu sudah menjadi bangsa yang ber-Ketuhanan, ber-Kemanusiaan, ber-Persatuan, ber-Kerakyatan, dan ber-Keadilan.⁶ Inilah “*the personality values of the Indonesian nation.*”⁷

Yudi Latif⁸, mantan Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang di kemudian hari berganti nama menjadi Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP), menunjukkan bahwa Pancasila lahir sebagai upaya untuk mencari persetujuan yang membawa kebahagiaan bersama bagi masyarakat Indonesia. Dalam terang ini maka Pancasila bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk moral publik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menyiratkan kebajikan-kebajikan yang ada dalam diri manusia

Indonesia. Sila Ketuhanan, menurut Latif, terkait dengan kebajikan *sanctity*. Setiap manusia selalu memiliki nilai yang dianggapnya paling penting dan paling dimuliahkan. Nilai inilah yang menjadi jangkar untuk menjamin terjadinya kohesi sosial dalam masyarakat. Meskipun setiap manusia adalah makhluk yang bebas, namun ketika dirinya masuk ke dalam masyarakat maka kediriannya ditundukkan pada keseluruhan. Di sinilah manusia ditarik masuk ke ranah *sanctity*. Latif lebih lanjut mengatakan bahwa ranah *sanctity* ini tidak berhenti hanya pada “Tuhan kelompok” saja, tetapi sampai pada “Tuhan universal.” Ketuhanan dalam Pancasila adalah Ketuhanan yang telah diintegrasikan ke dalam *civic religion* yang bersifat inklusif. Sila Kemanusiaan terkait dengan kebajikan *care and liberty*. Kebajikan ini terkait dengan kesadaran bahwa kita bisa berada bersama yang lain hanya jika ada cinta dan kesediaan untuk mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus *care* dengan yang lain untuk mengatasi ancaman bersama, dan memerjuangkan *liberty* di-

⁶ Hastanti Widy Nugroho, “Etika Keutamaan Dalam Nilai-Nilai Pancasila” (Menara Ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat UGM), accessed January 22, 2020, https://drive.google.com/file/d/0B35udyIfjcr4d0lncDFrODcteDg/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.

⁷ M. Mukhtasar Syamsuddin, “Redefining The Position Of Pancasila As Indonesian Philosophy In The Era Of Globalization” (Menara Ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat UGM, 2017), <https://drive.google.com/file/d/0B0mBqI08o3d9S0lyMU44UFN4eFU/>

view?usp=drive_open&usp=embed_facebook; Agus Widjojo, “Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Aras Global,” *Law Research Review Quarterly* 3, no. 1 (2016): 5–18.

⁸ Yudi Latif, “Pancasila Sebagai Titik Temu,” Libianko Sianturi, accessed January 23, 2020, <https://www.facebook.com/1753567298058416/posts/pancasila-sebagai-titik-temuyudi-latifcendekiawanmedia-indonesia-31-mei-2019pada/2309013885847085/>.

mana setiap manusia bisa bebas dari penindasan dan pengekan. Sila Persatuan terkait dengan kebajikan *loyalty* di mana setiap manusia Indonesia bersedia menundukkan dan meleburkan individualitas dan partikularitasnya pada kepentingan bersama. Ada kesadaran untuk merawat “rumah” bersama. Rasa cinta pada negeri (*amore patria*) merupakan kesalehan puncak, sehingga kebaikan umum (*bene commune*) berada di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sila Kerakyatan terkait dengan kebajikan *authority*. Ada penghargaan pada otoritas demi kedaulatan dan keteraturan kehidupan publik. Di sini pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan semangat cinta kasih berlandaskan pada cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat kebijaksanaan dalam tatanan lembaga-lembaga yang demokratis. Akhirnya, sila Keadilan terkait dengan kebajikan *fairness*. Keberadaan manusia merupakan roh yang men-jasmani. Itu sebabnya kohesi sosial dalam masyarakat manapun juga hanya bisa terwujud jika ada pemahaman bersama tentang keadilan, yang pada akhirnya memberi harapan pada terciptanya kesejahteraan bersama.

Ig. Kingkin Teja Angkasa⁹ menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya sudah sangat memadai untuk dijadikan landasan pendidikan karakter manusia Indonesia. Persoalannya selama ini adalah karena pendidikan nilai-nilai Pancasila hanya berhenti sampai pada tataran kognitif saja, dan tidak diimplementasikan dalam tindakan konkrit. Sila Ketuhanan, misalnya, seharusnya bisa diajarkan melalui praktik toleransi pada orang-orang yang beragama dan berkepercayaan lain. Sila Kemanusiaan bisa diajarkan melalui praktik penghargaan pada orang lain. Tindakan yang berorientasi pada kerapian, kebersihan diri, ketekunan adalah contoh-contoh praktik sila Kemanusiaan ini. Sila Persatuan bisa diajarkan melalui pengenalan akan beragam budaya yang hidup di Indonesia. Sila Kerakyatan bisa diajarkan melalui sikap taat asas, menaati prosedur dan menghargai martabat orang lain sesuai dengan hati nurani, yang merupakan sikap-sikap dasar dalam kehidupan demokratis. Sedangkan sila Keadilan bisa diajarkan melalui sikap bela rasa pada orang-orang lain.

⁹ Ig. Kingkin Teja Angkasa, “Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila,” *Kompas.com*, June 12, 2010, [*Pendidikan Karakter Untuk Membangun Manusia Indonesia Yang Unggul* \(blog\), December 21, 2012, <http://deaneducation.blogspot.com/2012/12/pendidikan-karakter-untuk-membangun.html>; lih. jg. Mus tansyir, “Pancasila Sebagai Sumber Kecerdasan Ideologis Bangsa Indonesia.”](https://lifestyle.kompas.com/read/2010/12/06/09044572/Pendidikan.Karakter.Berbasis.Pancasila;ThanonAriaDewangga,“PendidikanKarakterUntukMembangunManusiaIndonesiaYangUnggul,”</p></div><div data-bbox=)

Bambang Herutomo¹⁰ dengan tegas menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Sila Ketuhanan, menurut Herutomo, sesuai dengan pengakuan tentang keesaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Ulangan 6:4. Sila Kemanusiaan sesuai dengan perintah untuk menegakkan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Yesaya 56:1 dan Ulangan 16:20. Hal ini bisa terjadi karena Allah adalah Allah yang mencintai keadilan (Ibr. 1:9). Sila Persatuan sesuai dengan panggilan untuk mendatangkan damai sejahtera sebagaimana disebutkan dalam Roma 14:19, agar kita terhindar dari perpecahan dan dapat erat bersatu (1 Kor. 1:10). Sila Kerakyatan sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang pemimpin bangsa yang memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan (1 Raj. 3:16-27). Karunia semacam itu dapat kita minta dari Allah (Yak. 1:5). Penyelesaian masalah dengan cara musyawarah juga ditunjukkan dalam Kisah Para Rasul 1:23. Akhirnya sila Keadilan sesuai dengan panggilan untuk mendatangkan keadilan bagi orang-orang yang lemah sebagaimana disebutkan dalam Mazmur 82:3.

Semua tulisan di atas berusaha menunjukkan bahwa Pancasila bisa dimaknai

dari sudut pandang Etika Kebajikan (*virtue ethics*). Namun yang menjadi masalah adalah, nilai-nilai kebajikan yang dikaitkan dengan sila-sila Pancasila diasumsikan begitu saja sebagai sesuatu yang dipahami secara sama oleh semua orang. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan utama yang ingin dijawab oleh nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam sejarah kelahirannya (esensi historis), dan bagaimana hal itu terkait dengan kebajikan-kebajikan tertentu yang diusulkan oleh para penulis. Nugroho, misalnya, tidak memberi penjelasan tentang apa yang ia maksud dengan keadilan atau persatuan, dan persoalan apa yang ingin dijawab oleh nilai-nilai tersebut dalam sejarah kelahiran sila-sila Pancasila yang dirujuk. Ia hanya mengatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan yang sudah lama ada dalam diri manusia Indonesia. Latif memang berusaha menunjukkan kebajikan-kebajikan spesifik yang menurutnya sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Namun ia mengungkapkan esensi-esensi yang begitu umum, universal. Angkasa juga berbicara tentang kebajikan-kebajikan tertentu yang menurutnya sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila, namun ia langsung berbicara tentang contoh-contoh konkrit dari

¹⁰ Bambang Herutomo, "Nilai-nilai Pancasila Tidak Bertentangan dengan Iman Kristen," *Kompasiana*, November 21, 2018, <https://www.kompasiana.com>

[/bambangherut0m0b711/5bf5868712ae9472b10cf207/nilai-nilai-pancasila-tidak-bertentangan-dengan-iman-kristen](https://www.kompasiana.com/bambangherut0m0b711/5bf5868712ae9472b10cf207/nilai-nilai-pancasila-tidak-bertentangan-dengan-iman-kristen).

pewujudnyataan kebajikan-kebajikan yang ia pandang sesuai dengan sila-sila Pancasila, tanpa memberi penjelasan mengenai makna kebajikan-kebajikan yang dibicarakannya. Sedangkan Herutomo berusaha melangkah lebih jauh dari Latif dan Angkasa dengan menunjukkan kesesuaian sila-sila Pancasila dengan ajaran-ajaran spesifik yang bisa didapatkan dalam Alkitab. Namun ia juga tidak menjelaskan bagaimana ajaran dalam ayat yang dirujuk bisa dipandang sesuai untuk dipakai menafsirkan esensi historis dari sila Pancasila terkait.

Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang mempertemukan dua hal, yaitu makna masing-masing sila dalam Pancasila sebagaimana ia dimaksudkan dalam sejarah kelahirannya (esensi historis), dan kebajikan Kristiani tertentu yang selaras dengan esensi historis sila Pancasila terkait. Inilah yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini dengan menelaah makna dan persoalan yang ingin dijawab oleh sila-sila Pancasila dalam sejarah kelahirannya, serta keselarasannya dengan kebajikan-kebajikan Kristiani.

¹¹ Al Halim, "Posisi Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat," *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 517–32.

¹² Baidhowi, "Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila," *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 497–516; Anggalih Bayu Muh Kamim, "Pancasila Sebagai Payung Pendidikan Interreligius, Upaya Untuk Mengatasi Radikalisme Agama Di Indonesia" (Menara Ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat UGM), accessed January 22, 2020, <https://drive.google.com/file/d/0B5oYZGP7oYzjV>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Pancasila Dalam Masyarakat Indonesia Yang Majemuk

Posisi legal Pancasila sebagai ideologi negara tidak bisa diganggu-gugat.¹¹ Yang perlu dilakukan adalah aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi 1998 memang merupakan cerminan dari ketidak-puasan akan pelaksanaan Pancasila. Namun itu tidak berarti bahwa Pancasila perlu diganti dengan ideologi yang lain.¹² Azyumardi Azra mengingatkan, bahwa di tengah-tengah disorientasi dan dislokasi budaya dan peradaban bangsa Indonesia, maka perlu dilakukan "rejuvenasi Pancasila." Hal ini sangat mendesak dilakukan karena jika Pancasila didera oleh krisis ketidak-pedulian anak bangsa, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan juga akan mengalami krisis identitas.¹³

Michael Walzer dalam bukunya *Thick and Thin*¹⁴ menunjukkan bahwa di dalam setiap moralitas manusia senantiasa terkandung dua macam makna. Yang per-

EF2eUdSRkxYeW8/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.

¹³ Azyumardi Azra, "Kegalauan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejah teraan Sosial* 1, no. 1 (July 5, 2012): 1-12–12, <https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9656>.

¹⁴ Michael Walzer, *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*, 1st Edition (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2019).

tama adalah makna yang maksimal, yang tebal, karena dibentuk oleh sejarah dan kebudayaan masing-masing kelompok masyarakat. Yang kedua adalah makna yang minimal, yang tipis, karena merupakan nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh semua kelompok masyarakat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat majemuk. Moralitas yang maksimal dan tebal senantiasa hadir mendahului moralitas yang minimal dan tipis. Moralitas manusia dalam masyarakat majemuk senantiasa maksimal dan tebal sejak awal mulanya, dan baru kemudian menjadi minimal dan tipis pada saat-saat tertentu ketika bahasa moral diterjemahkan untuk tujuan bersama.

Dalam terang pemahaman ini maka Pancasila adalah moralitas minimal dan tipis. Pemaksaan Pancasila sebagai sebagai moralitas tebal dan sumber moralitas utama sebagaimana pernah dilakukan di masa Orde Baru adalah satu langkah yang keliru. Langkah ini membuat moralitas minimal menjadi landasan untuk menciptakan moralitas maksimal. Itulah sebabnya muncul resistensi dari berbagai kelompok masyarakat, yang kemudian menjadi sangat terbuka di era Reformasi pasca Orde Baru. Ketika berbagai kelompok dalam masyarakat majemuk bertemu, masing-masing kelompok pada hakikatnya sudah mempunyai moralitas yang maksimal dan tebal. Alur dari moralitas maksimal dan tebal ke

moralitas minimal dan tipis ini tidak dapat dan tidak boleh dibalik arahnya.

Ketika berbagai kelompok masyarakat bertemu untuk membahas masalah keadilan sebagaimana disebutkan dalam sila kelima Pancasila, misalnya, semua kelompok pasti setuju bahwa keadilan harus ditegakkan di bumi Indonesia. Tapi ini adalah moralitas minimal yang tipis sifatnya. Begitu kelompok-kelompok tersebut berbicara tentang apa yang dimaksud dengan keadilan, maka masing-masing kelompok mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Inilah moralitas maksimal yang sifatnya tebal. Tidak pernah ada pemahaman bersama tentang keadilan yang bisa menjadi titik berangkat dalam dialog tentang keadilan, apalagi menjadi sumber nilai untuk membentuk norma-norma keadilan yang diharapkan diberlakukan oleh semua kelompok. Nilai bersama senantiasa merupakan reiterasi, turunan, akibat dari moralitas maksimal, dan bukan merupakan sebab dari moralitas maksimal tersebut. Penafsiran tunggal Pancasila yang di masa lalu dimonopoli oleh pemerintah dengan demikian harus dikritisi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pun perlu bertindak hati-hati, jika tidak ingin terperosok dalam jurang yang sama seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru, dan membuat sebagian orang kemudian malah menjadi

antipati terhadap Pancasila. M. Mukhtasar Syamsuddin dengan tepat mengatakan bahwa secara axiologis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila bukanlah nilai-nilai yang diberikan dari luar, melainkan nilai-nilai yang sengaja diciptakan bersama oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kelompok.¹⁵

Komunitas primordial dengan demikian memainkan peranan sangat penting dalam pembentukan moralitas seseorang yang sifatnya maksimal dan tebal karena di dalam komunitas primordial itulah masing-masing orang untuk pertama kalinya belajar bahasa moralitas sebagaimana ia belajar berbicara dalam bahasa ibu. Moralitas senantiasa merupakan ciptaan dari pengalaman kehidupan bersama dalam satu komunitas partikular. Sekalipun dalam masyarakat majemuk moralitas maksimal seseorang bisa saja merupakan hasil bentukan dari berbagai komunitas primordial (misalnya komunitas agama Kristen, komunitas budaya Jawa, komunitas budaya Tionghoa, dan sebagainya), namun biasanya agama dan kepercayaan memainkan peranan yang sangat penting sebagai landasan bagi pengakomodasian nilai-nilai budaya lainnya. Hal ini disebabkan karena agama dan kepercayaan menyediakan “metaphora sentral” atau “narasi agung” yang mengandung di dalamnya ide-ide yang sangat absolut ten-

tang Tuhan, manusia, dan dunia. Oleh karena itu, komunitas agama dan kepercayaan sebagai komunitas primordial mempunyai peranan yang sangat krusial dalam pembentukan moralitas maksimal seseorang.

Apakah dengan demikian kita harus terjebak dalam anarkhi dan relativisme? Tidak! Pancasila bisa diterima dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia yang majemuk sejauh ia dipahami sebagai moralitas minimal yang merupakan reiterasi (turunan) dari moralitas maksimal yang ada di dalam dan dihidupi oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Sebagai reiterasi, Pancasila bukan merupakan sumber nilai bagi moralitas maksimal kelompok-kelompok tersebut, melainkan turunan atau cerminan dari moralitas maksimal yang dimiliki dan dihidupi oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Soekarno sendiri dengan kerendahan hati mengakui apa yang terjadi pada malam menjelang pidatonya yang monumental pada tanggal 1 Juni 1945, yang di kemudian hari diakui sebagai hari lahirnya Pancasila,

Di dalam pidato beberapa waktu lalu di Senayan itu, saya telah ceritakan, tengah-tengah malam yang keesokan harinya saya akan diharuskan mengucapkan pidato giliran saya, saya keluar dari rumah Pengangsaan Timur 56 Pada saat itu dengan segenap kerendahan budi saya

¹⁵ Syamsuddin, “Redefining The Position Of Pancasila As Indonesian Philosophy In The Era Of Globalization.”

memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa: "Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah petunjuk kepadaku. Berikanlah petunjuk kepadaku apa yang besok pagi akan kukatakan, sebab Engkaulah ya Tuhanku, mengerti bahwa apa yang ditanyakan kepadaku oleh Ketua Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai itu bukan barang yang remeh, yaitu dasar daripada Indonesia Merdeka." . . . Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham yang berkata: Galilah apa yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali dalam ingatan-ku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.¹⁶

Ini tidak berarti bahwa moralitas minimal seperti Pancasila tidak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial. Moralitas minimal sangat dibutuhkan dalam masyarakat majemuk untuk mencegah terjadinya partikularisme absolut dan anarkhi di mana kelompok masyarakat yang satu tidak ambil peduli dengan kelompok masyarakat lainnya. Disini moralitas minimal berfungsi sebagai titik pijak bagi solidaritas sosial dan kritik sosial antar kelompok. Moralitas minimal juga sangat dibutuhkan

untuk mencegah terjadinya hegemoni dimana moralitas maksimal satu kelompok tertentu dipaksakan untuk menjadi moralitas universal bagi semua anak bangsa.

Makna Pancasila dapat ditemukan dalam moralitas maksimal masing-masing kelompok masyarakat yang ada di Indonesia, dan komunitas agama serta kepercayaan merupakan komunitas primordial yang paling berpengaruh dalam pembentukan moralitas maksimal seseorang, tanpa harus membuat masing-masing komunitas agama tadi hidup eksklusif dan terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Identitas diri sebagai orang Kristen Indonesia, misalnya, tidaklah berarti bahwa orang-orang Kristen mempunyai identitas keagamaan yang sedemikian uniknya hingga tidak bisa merengkuh dan merangkul orang-orang dengan identitas keagamaan yang berbeda. Menjadi orang Kristen dan menjadi orang Indonesia adalah dua hal yang tidak perlu dipisahkan, namun bisa diintegrasikan melalui Pancasila. Julianus Mojau menunjukkan bahwa identitas alkitabiah dan kristologis sebagai penanda identitas Kristen di Indonesia pada hakikatnya tidaklah bersifat asimetris terhadap penanda identitas agama lain. Sebaliknya, penanda tersebut justru bersifat dialogis terhadap penanda identitas agama lain, sejauh penanda identitas Kristen tidak

¹⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 12-14.

dipahami dalam kerangka analogi-analogi yang ontologis, tapi lebih sebagai analogi-analogi yang fungsional.¹⁷

Kelompok-kelompok agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dengan demikian perlu didorong untuk menafsir dan membumikan makna Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dari sudut pandang ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dialog di antara berbagai macam penafsiran inilah yang pada gilirannya akan saling menguatkan nilai-nilai reiteratif yang menjadi titik pijak bagi solidaritas sosial dan kritik sosial antar kelompok. Yudi Latif mengingatkan bahwa upaya pembumian Pancasila harus melibatkan di dalamnya tiga elemen utama, yaitu mitos (keyakinan), logos (penalaran), dan etos (kejuangan). Itu artinya aktualisasi Pancasila memang harus melibatkan penafsiran sila-sila Pancasila dari sudut pandang keyakinan dan penalaran agama masing-masing kelompok, serta tekad kuat dari umat beragama untuk mengejawantahkan sila-sila Pancasila tersebut secara konkrit tanpa merasa mengkhianati keyakinan agama para pelakunya.¹⁸

Para pemuka agama sudah sepatutnya berperan sebagai penatar Pancasila. Anggi Afriansyah mengkritisi bahwa selama ini Pancasila hanya diajarkan di sekolah-sekolah saja,¹⁹ dan oleh karenanya menjadi elitis. *Locus* pembahasan dan penataran Pancasila perlu diperluas ke gereja, masjid, vihara, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Penataran Pancasila perlu menjadi bagian integral dari pembinaan kerohanian dan moralitas umat beragama guna memberikan pemahaman tentang penafsiran sila-sila dalam Pancasila dari perspektif agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menunjukkan nilai-nilai reiteratif yang dimiliki bersama dengan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain.

Tujuan dari aktifitas semacam itu adalah untuk menyajikan rasionalitas penafsiran dan dampak-dampak sosial politis dari rasionalitas tersebut secara konkrit. Diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan, bukan melalui cara-cara indoktrinatif dan rezimentatif, melainkan melalui pendidikan multikultural, pendidikan kewargaan, pendidikan demokrasi, dan sejenisnya.²⁰ Dalam kaitan dengan inilah

¹⁷ Julianus Mojau, "Identitas-Identitas Teologis Kristen Protestan Indonesia Pasca Orde Baru: Sebuah Pemetaan Awal," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 2, no. 2 (October 30, 2017): 109–26, <https://doi.org/10.21460/gema.2017.22.290>.

¹⁸ Yudi Latif, "Menghidupkan Semangat Pancasila," *Media Indonesia*, May 29, 2017, <https://media>

indonesia.com/read/detail/106569-menghidupkan-semangat-pancasila.

¹⁹ Anggi Afriansyah, "Pancasila dalam Perbuatan," *Media Indonesia*, October 9, 2019, <https://media.indonesia.com/read/detail/264186-pancasila-dalam-perbuatan>.

²⁰ Azra, "Kegagalan Identitas dan Kekerasan Sosial."

maka kelompok-kelompok agama dan kepercayaan perlu didorong untuk melakukan dialog internal tentang penafsiran kelompok mereka terhadap Pancasila. Dan berbagai kelompok agama dan kepercayaan itu secara bersama-sama juga didorong untuk melakukan dialog lintas kelompok agama dan kepercayaan guna memaknai moralitas minimal yang disepakati bersama. Agus Widjojo, dari Lembaga Pertahanan Nasional, mengusulkan dibuatnya semacam “Grand Design Wawasan Kebangsaan.”²¹ Upaya aktualisasi nilai Pancasila seperti ini akan bermuara pada akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila. Ini tidak hanya menyangkut konsep-konsep abstrak belaka, tapi lebih terutama pewujudan konkrit dari pemaknaan Pancasila dalam praksis. Sebuah ideologi hanya bisa bertahan jika ia memiliki nilai praksis, tidak hanya nilai dasar yang bersifat abstrak atau nilai instrumental dalam bentuk kebijakan saja. Jika sebuah ideologi tidak bisa diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.²² Yudi Latif mengingatkan bahwa segenap elemen bangsa

Indonesia perlu terus menerus menggumuli “struktur makna terdalam” dari Pancasila “di tengah kemungkinan keterpecahan, kerapuhan landasan, dan disorientasi yang melanda kehidupan kebangsaan.”²³

Sila-Sila Pancasila dan Kebajikan-Kebajikan Kristiani

Sudah disebutkan di atas bahwa Pancasila adalah moralitas minimal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini untuk kepentingan solidaritas sosial dan kritik sosial. Aktualisasi Pancasila dengan demikian bergantung pada penafsiran dan pemaknaan sila-sila Pancasila dari sudut pandang masing-masing kelompok agama, serta dialog antar berbagai kelompok beragama ini untuk menciptakan wawasan bersama, payung bersama. Dalam terang ini maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana orang-orang Kristen bisa menghayati dan mengamalkan Pancasila berdasarkan Etika Kebajikan yang berlandaskan pada kebajikan-kebajikan Kristiani yang selaras dengan esensi historis sila-sila Pancasila?²⁴

²¹ Widjojo, “Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Aras Global.”

²² Yudistira, “Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 01 (2016): 421–36, <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21325>; Rubiyono, “Restorasi Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 19–30; Sudjijono Sastroatmodjo, “Membumikan Pancasila Sebagai

Pola Perilaku Melalui Gerakan Bersama Pendidikan,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 627–40.

²³ Yudi Latif, “Memanjurkan Pancasila,” *Kompas.Id*, May 31, 2019, <https://kompas.id/baca/opini/2019/05/31/memanjurkan-pancasila/>.

²⁴ Lih. Jg. Alan Kreider, Eleanor Kreider, and Paulus Widjaja, *A Culture of Peace: God’s Vision for the Church* (Intercourse, PA: Good Books, 2005), 69–94.

Sila pertama Pancasila berbicara tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam sejarahnya, sila Ketuhanan ini muncul sebagai titik temu dalam pergumulan tarik menarik antara kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara di mana ada pemisahan tegas antara Negara dan Agama, dan kelompok yang menginginkan sebaliknya, Indonesia menjadi Negara Agama. Meskipun terjadi pergumulan yang tidak mudah, namun para pendiri Indonesia jelas mengafirmasi fakta bahwa di tengah-tengah kontribusi umat beragama yang begitu besar pada pembentukan negara Indonesia yang merdeka, tidaklah mungkin bisa dibayangkan adanya sebuah ruang publik yang hampa Tuhan.²⁵ Para pendiri bangsa dan negara Indonesia ini kemudian menetapkan titik temu yang lebih mengedepankan diferensiasi (*differentiation*) urusan agama dan urusan negara, dibandingkan pemisahan (*separation*) agama dan negara maupun privatisasi (*privatization*) agama.²⁶ Ini merupakan bentuk ketegasan para pendiri bangsa dan negara Indonesia bahwa Ketuhanan merupakan landasan moral spiritual yang sangat penting dan dibutuhkan bagi landasan-landasan etis politis dari sila-

sila Pancasila lainnya, tanpa mengooptasi sila-sila yang lain ke dalam dirinya.

Soekarno dengan tegas menyerukan, “Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan.”²⁷ Pernyataan Soekarno ini menggaris-bawahi pengakuan bahwa masing-masing individu bangsa Indonesia maupun sebagai satu kesatuan kolektif bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan.²⁸ Tidak ada individu Indonesia yang tidak ber-Tuhan, pun tidak ada pula bangsa Indonesia yang tidak ber-Tuhan. Stella Y.E. Pattipeilohi membuktikan bahwa sila pertama Pancasila merupakan sebuah model interkulturalitas yang cerdas untuk menyerap nilai-nilai Ketuhanan dari mana saja dalam masyarakat Indonesia, tanpa terjatuh ke dalam cengkeraman hegemoni satu kelompok agama.²⁹

Lebih lanjut, pengakuan iman sebagaimana tertera dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa,” menggaris-bawahi kepercayaan segenap elemen bangsa Indonesia akan peranan Allah dalam pewujudan kemerdekaan yang membawa damai di bumi Indonesia. Allah-

²⁵ Latif, *Negara Paripurna*, 67-95; Bartolomeus Samho et al., *Pancasila Kekuatan Pembebas*, ed. Lani Dwikoratno (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 96-102 repository.unpar.ac.id/handle/123456789/1671.

²⁶ Latif, *Negara Paripurna*, 95-121.

²⁷ Latif, 74.

²⁸ Samho et al., *Pancasila Kekuatan Pembebas*, 97.

²⁹ Stella Yessy Exlentya Pattipeilohy, “Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila Sebagai Model Interkulturalitas,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahan* 3, no. 2 (October 26, 2018): 121-46, <https://doi.org/10.21460/gema.2018.32.363>.

lah pihak pertama dan yang terutama dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta ini tidak bisa dinafikkan atau ditiadakan oleh siapapun juga. Fakta ini pula yang pada gilirannya membawa pengharapan bahwa sebagaimana di masa lalu Allah sudah menganugerahkan kemerdekaan yang membawa damai lahir batin bagi bangsa Indonesia, maka Ia pasti akan terus bekerja memelihara kemerdekaan itu di masa kini, masa depan, dan sampai selamanya. Tugas segenap warga negara Indonesia, termasuk orang-orang Kristen di dalamnya, adalah ikut serta berpartisipasi dalam pekerjaan Allah ini sebagai mitra-mitra-Nya.

Kebajikan Kristiani yang selaras dengan esensi historis sila pertama ini adalah *pengharapan*. Kebajikan ini penting mengingat perjuangan memelihara kemerdekaan, dengan berbagai macam dinamika persoalannya, bukanlah perjuangan yang mudah. Berbagai macam konflik sosial berbasis identitas dan gerakan-gerakan radikalisme agama sebagaimana menyeruak dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan peringatan yang jelas bahwa perjuangan untuk memelihara kemerdekaan bukanlah perjuangan yang bersifat instan, langsung jadi. Upaya untuk tetap menjaga diferensiasi antara urusan agama dan urusan

negara, tanpa terjatuh dalam pemisahan keduanya ataupun privatisasi agama, adalah sebuah proses jangka panjang yang penuh dengan peristiwa jatuh bangun. Orang-orang Kristen yang menjadi mitra-mitra Allah dalam perjuangan ini harus melandaskan perjuangannya di atas pengharapan pada Tuhan, sang Raja Damai. Pengharapan bahwa Allah senantiasa bekerja menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di bumi yang Ia cintai, termasuk bumi Indonesia. Tidak boleh ada seorangpun yang menyerah pada keputus-asaan atau sinisme. Dalam Mazmur 62:1, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, “Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku.” Demikian pula dalam Mazmur 46:10a disebutkan, “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah!”

Orang-orang Kristen juga patut menyadari bahwa perjuangan untuk memelihara kemerdekaan bukanlah upaya yang bergantung pada kuasa dan kehebatan manusiawi. Perjuangan tersebut adalah sebuah doxology, upaya untuk memuliakan Allah sendiri.³⁰ Tuhan Yesus pernah berseru, “Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja juga” (Yoh. 5:17). Inilah pula yang harus dilakukan orang-orang Kristen. Upaya memelihara diferensiasi urusan agama dan urusan negara adalah

³⁰ Paulus S. Widjaja, “Membangun Teologi Politis di Indonesia (dari Teologi Sukses ke Politik Pelayanan dan Doksologi),” *Gema Teologi*, no. 59 (October 30,

2006), <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/236>.

upaya yang harus dilakukan dengan penuh semangat, meskipun bukan sebuah proses yang mudah, justru karena orang-orang Kristen memahami dirinya sebagai mitra-mitra dari Allah yang tidak pernah berhenti bekerja di dunia ini. Orang-orang Kristen tidak boleh menjadi orang-orang yang pasif dan diam saja. Untuk maksud ini pulalah maka Allah sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik, yang dilengkapi dengan daya imajinasi, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup lainnya. Ini adalah daya yang luar biasa yang sangat dibutuhkan untuk perjuangan sebagai mitra-mitra Allah.³¹

Pengharapan pada Allah yang tetap bekerja ini pulalah yang seharusnya mengingatkan segenap elemen bangsa Indonesia bahwa sekularisme yang menafikkan Allah di satu pihak, maupun fundamentalisme agama yang menafikkan kelompok-kelompok umat beragama yang berbeda di pihak lain, sama sekali tidak memiliki tempat di bumi Indonesia. Sekularisme membuang dan menyingkirkan Allah dari kehidupan manusia, sedangkan fundamentalisme agama membuang dan menyingkirkan umat beragama lain atas nama Allah. Baik sekularisme maupun fundamentalisme agama tidak memiliki tempat di tengah bangsa dan

negara Indonesia, justru karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan.

Sila kedua Pancasila berbicara tentang “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Selain pergumulan tarik menarik antara kubu yang menghendaki pemisahan antara Agama dan Negara, dan kubu yang menghendaki Negara Agama, ada pula tarik menarik antara kubu yang menekankan individualitas dan kubu yang menekankan komunalitas.³² Radjiman Wediodiningrat dalam acara pembukaan sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) Indonesia menegaskan, “. . . kita harus melenyapkan Kepentingan Diri Sendiri dengan jalan senantiasa menempok *Diri Peribadi*, sehingga kita akan membangun sifat kita tolong-menolong dan gotong-royong yang semurni-murninya.”³³ Soekarno melengkapinya dengan mengatakan, “kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa.”³⁴ Lebih lanjut ia mengatakan, “jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya.”³⁵

³¹ John Paul Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*, Reprint edition (Oxford: Oxford University Press, 2010).

³² Latif, *Negara Paripurna*, 178-201, 237-244.

³³ Latif, 179.

³⁴ Latif, 180.

³⁵ Latif, 187.

Artinya, memang ada pengakuan akan individualitas masing-masing orang yang tinggal di dalam wilayah negara Indonesia. Penghargaan akan Hak Asasi Manusia senantiasa berawal dari penghargaan atas individualitas manusia. Namun bersamaan dengan itu juga ada keyakinan bahwa masing-masing individu harus bersedia terbuka untuk hidup bersama dengan yang lain dan merangkul yang lain sebagai sesama insan manusia. Bersedia untuk saling tolong-menolong dan bergotong-royong, bahkan sekalipun keterbukaan itu membuat dirinya terluka. Orang per orang tidak bisa hanya mengedepankan hak pribadinya sendiri-sendiri, tanpa pada saat yang sama memenuhi kewajibannya pada yang lain. Ada penghargaan yang tinggi pada prinsip Hak Asasi Manusia secara universal, tapi penghargaan itu tidak meniadakan pemberlakuan kewajiban dalam hidup bersama yang lain. Ketika dianugerahi gelar Dr HC dalam bidang kemanusiaan dari Soka University, Jepang, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato tentang Pancasila, di mana beliau mengatakan bahwa nilai kemanusiaan yang merupakan bagian integral dari Pancasila adalah ruh yang memberi jalan bagi lahirnya politik emansipatoris.³⁶ Keter-

bukaan inipun tidak hanya berlaku bagi sesama warga negara Indonesia saja, tetapi juga bagi segenap insan manusia di manapun juga. Ini adalah sebuah kemanusiaan semesta yang adil dan beradab.

Kebajikan Kristiani yang selaras dengan esensi historis sila kedua ini adalah *kerentanan*. Istilah “kerentanan” (*vulnerability*) berasal dari kata bahasa Latin *vulnerabilis*, yang berarti “terluka.” *Vulnerability* bisa dipahami sebagai kesediaan untuk terbuka dan terluka. Kesediaan ini sangat dibutuhkan dalam relasi antar manusia karena relasi antar manusia senantiasa merupakan relasi terbuka. Dalam relasi ini selalu saja ada kemungkinan gesekan, dan tidak seorangpun dapat menjamin hasil akhir dari relasi tersebut. Hasil akhirnya bisa saja menyenangkan, tapi bisa juga menyakitkan, karena manusia adalah makhluk yang sikap serta perilakunya tidak pernah bisa diprediksi. Dalam Filipi 2:5-8, firman Tuhan mengatakan,

Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah meren-

³⁶ Rini Kustiasih, “Kemanusiaan Lahirkan Politik Emansipatoris,” *Kompas.Id*, January 9, 2020, <https://>

kompas.id/baca/utama/2020/01/09/kemanusiaan-lahirkan-politik-emansipatoris/.

dahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.

Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa panggilan orang-orang Kristen adalah untuk meneladani Kristus, dan bersedia menanggalkan ke-aku-annya dengan segala kehormatan yang melekat padanya agar bisa merangkul orang lain, bahkan musuh sekalipun juga, atas nama kemanusiaan. Orang-orang Kristen harus bisa membuka tangan untuk menciptakan ruang bagi orang lain dan merangkul mereka tanpa syarat. Keterbukaan semacam ini memang akan membuat orang tersebut menjadi rentan dan mudah dilukai oleh pihak lain. Tapi itulah konsekuensi yang memang harus disadari. Tanpa adanya kerentanan maka mustahil kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan. Masing-masing orang akan bersembunyi ketakutan di dalam guanya sendiri-sendiri. Dalam terang ini pulalah orang-orang Kristen harus mampu mengambil prakarsa mandiri, tidak menunggu. Orang-orang Kristen tidak harus menunggu pihak lain untuk menghampiri dirinya. Ia harus mengambil prakarsa mandiri untuk menghampiri dan merangkul pihak lain, bahkan pihak yang mungkin dianggap sebagai musuh sekalipun juga.

Sila ketiga Pancasila berbicara tentang “Persatuan Indonesia.” Harus disadari bahwa persatuan yang menjadi cikal bakal

terbentuknya bangsa dan negara Indonesia bukanlah sekedar persatuan historis belaka, tapi yang lebih utama lagi adalah persatuan etis. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk bukan karena secara historis dari dahulu kalanya sudah merupakan sebuah negara kesatuan, tetapi karena ada keputusan etis dari elemen-elemen bangsa untuk bersatu. Kesatuannya lebih seperti kesatuan suami-istri yang dipertautkan satu sama lain berdasarkan keputusan sukarela dari masing-masing pihak untuk saling mencintai dalam satu kesatuan keluarga. Tidak ada pihak eksternal yang memaksakan kesatuan tersebut. Kesatuan semacam itu sebenarnya lebih sulit terbentuk dibandingkan kesatuan yang dipaksakan oleh pihak eksternal. Kesatuan bangsa dan negara Indonesia bisa terjadi karena semua elemen bangsa mengambil keputusan etis untuk bersatu, yang secara formal diikrarkan dalam Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 hingga berlanjut pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan sampai saat ini.

Tanpa adanya komitmen kuat untuk menjaga dan memelihara kesatuan bangsa dan negara Indonesia, maka bangsa dan negara Indonesia akan terkoyak dan tercabik-cabik. Tarik ulur di awal kemerdekaan negara Indonesia tentang apakah negara Indonesia akan menjadi negara kesatuan atau negara federasi atau negara konfederasi, atau siapa yang bisa dikategorikan

sebagai bangsa Indonesia asli dan siapa yang bukan asli, bukanlah pergumulan yang mudah.³⁷ Bahkan sekedar untuk menetapkan batas wilayah negara Indonesia saja pada awal mulanya juga bukan hal yang mudah. Setidaknya ada empat kelompok pendapat yang berbeda terkait batas wilayah negara Indonesia, yaitu: (1) Hindia Belanda dulu, (2) Hindia Belanda dulu, ditambah Malaka, Borneo (sekarang Kalimantan) Utara, Papua, Timor dan pulau-pulau di sekelilingnya, (3) Hindia Belanda dulu ditambah Borneo Utara, Papua, dan semua wilayah Timor, (4) Hindia Belanda dulu minus Papua.³⁸

Kebajikan Kristiani yang selaras dengan esensi historis sila ketiga ini adalah *kerendahan-hati*. Dalam Amsal 16:18, firman Tuhan mengatakan, “Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.” Yesus juga pernah mengingatkan murid-muridNya dengan tegas, “Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan” (Luk. 14:11; lih. jg. Mat. 23:12; Luk. 18:14). Lao Tzu mempunyai kata-kata bijak, “Semua sungai mengalir ke laut [justru] karena laut berada lebih rendah dari semua sungai”³⁹ Kata-kata bijak ini ingin mengingatkan bahwa seseorang menjadi besar justru ketika

orang tersebut menempatkan dirinya sendiri di bawah semua yang lain.

Orang-orang Kristen harus belajar untuk tidak menganggap dirinya sendiri sebagai satu-satunya pemegang kebenaran, sebab tidak seorang pun di dunia ini yang mampu melihat seluruh kebenaran, apalagi melihat seluruh kebenaran itu sekaligus. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang Kristen harus belajar untuk hidup bersama dengan yang lain dalam kerendahan hati. Oleh karena itu sangatlah penting pada masa pasca kemerdekaan ini masing-masing elemen bangsa merendahkan dirinya dan golongannya di hadapan yang lain, serta tidak menganggap dirinya dan golongannya sebagai pihak yang paling berjasa dalam pembentukan bangsa dan negara Indonesia yang damai ini. Jika masing-masing pihak sibuk meninggikan dirinya sendiri, apalagi menuntut elemen-elemen bangsa yang lain untuk tunduk pada dirinya dan kelompoknya, maka persatuan Indonesia akan sangat sulit dipertahankan. Sama seperti sepasang suami istri yang tidak bisa saling menghargai satu sama lain, tapi menuntut yang lain untuk tunduk dan menurutinya, maka tidak akan mampu mempertahankan kelanggengan pernikahannya.

Sila keempat Pancasila berbicara tentang “Kerakyatan yang dipimpin oleh

³⁷ Latif, *Negara Paripurna*, 328-356.

³⁸ Latif, 344-345.

³⁹ *Tao Te Ching*, Bab 66, <http://www.egreenway.com/taoism/ttclz66.htm> (diakses 26.10.2018).

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.” Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para pendiri bangsa dan negara Indonesia sejak awal adalah untuk menemukan sebuah cara yang efektif agar suara dan aspirasi dari berbagai kelompok yang hidup bersama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia ini bisa didengarkan dan diselaraskan. Namun penyelarasan berbagai suara dan aspirasi serta kepentingan ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga benar-benar menghasilkan kesepakatan yang berkualitas, tidak sekedar saling mendengarkan demi toleransi saja.⁴⁰

Dalam kata-kata Natsir,

Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnya bukanlah toleransi yang kita maksud, karena itu hanya berarti mengelakkan persoalan. . . . Yang kita perlukan ialah konfrontasi dalam suasana toleransi sehingga dari pembenturan antara ide-ide dan pemikiran yang kita ajukan masing-masing kita sampai kepada kebenaran.⁴¹

Kebajikan Kristiani yang selaras dengan esensi historis sila keempat ini adalah *kesabaran sepenanggungan*. Dalam 1 Korintus 13:7, firman Tuhan mengatakan, “[Kasih] menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.” Istilah *hupomenoo* (sabar menanggung)

yang digunakan dalam ayat ini memiliki makna yang sangat kaya. Tidak sekedar menunjuk pada kesabaran ketika seseorang menghadapi situasi sulit, tetapi yang terutama adalah kesabaran untuk tetap berjalan bersama dengan pihak lain, bahkan ketika tidak tampak adanya titik terang di depan sekalipun juga. Kristus sendiri tidak pernah menyerah meskipun manusia berulang kali melakukan dosa. Dengan penuh kesabaran, Ia bersedia turun ke dunia dan berjalan bersama manusia-manusia yang berdosa. Ia sangat menghargai orang lain dan tidak memandangnya rendah. Bahkan murid-muridNya yang sudah gagal seperti Petrus ataupun Thomas juga tetap dicarinya. Ia tidak pernah kehilangan kesabarannya pada murid-muridNya ini.

Martitah Latif mengeluhkan banyaknya hukum yang tidak bermoral di Indonesia, karena hukum tersebut hanya menguntungkan pihak pemodal dan para kroni pejabat pemerintah. Hal ini mengakibatkan banyaknya hukum yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Situasi semacam ini, lanjut Latif, terjadi karena para pembuat hukum seringkali tidak menyusun hukum yang bermoral, yang partisipatif dan aspiratif, berdasarkan panduan Pancasila melalui mekanisme demokrasi permusyawaratan.⁴² Di sinilah dibutuhkan kesabaran

⁴⁰ Latif, 420-452.

⁴¹ Latif, 425.

⁴² Martitah Latif, “Reaktualisasi Ideologi Pancasila Dalam Semangat Pembentukan Hukum Yang

dari semua pihak untuk mau saling mendengarkan satu terhadap yang lain. Dalam masyarakat Indonesia sendiri sudah sejak lama dikenal mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan pada “kebijaksanaan.” Dalam proses ini tidak ada satupun pihak yang pendapatnya diterima sepenuhnya, tapi juga tidak ada satupun pihak yang pendapatnya ditolak sepenuhnya. Proses musyawarah untuk mufakat yang dilandaskan pada kebijaksanaan itu juga dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak berperilaku sebagai seorang diktator yang menindas bawahannya, tapi lebih sebagai seorang tua yang memimpin percakapan keluarga.⁴³ Musyawarah untuk mufakat yang dilandaskan pada kebijaksanaan seperti itu hanya bisa terjadi jika semua elemen bangsa bersedia berkomitmen bahwa tidak peduli bagaimanapun juga situasi hubungan yang ada di antara mereka, bahkan ketika seolah-olah tidak tampak ada solusi segera apapun juga di depan mata, semua pihak tetap bersedia berjalan bersama, senasib sepenanggungan dengan yang lain, bukannya saling menyingkirkan.

Tidak ada satu pihak pun yang menyerah terhadap yang lain, apapun juga situasi yang dihadapi.

Persoalan musyawarah untuk mufakat yang dilandaskan pada kebijaksanaan ini menjadi lebih penting lagi di masa sekarang karena demokrasi yang dipraktikkan dalam politik di Indonesia pada era pasca kejatuhan Soeharto dan rejim Orde Baru justru mengarah pada demokrasi transaksional atau demokrasi prosedural. Di sini penentu keputusan adalah kekuatan-kekuatan yang menjalankan formalitas demokrasi, dan bukan rakyat.⁴⁴ Oleh karena itu para pemimpin negara wajib mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dengan penuh kesabaran, dan bukannya mendengarkan suara dan aspirasi dirinya dan kelompoknya sendiri. Kesabaran itu juga dibutuhkan karena ada banyak kelompok yang sekarang ini senantiasa mengatas-namakan rakyat ketika menyampaikan aspirasinya, tapi tanpa validitas yang jelas. Kesabaran sepenanggungan tidak berarti bahwa seseorang harus senantiasa menerima apa yang disampaikan pihak lain. Namun itu berarti semua pihak

Bermoral,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 01 (2016): 79–92, <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21404>; Aloysius R. Entah, “Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 533–42; Yovta Arie Mangesti, “Hukum Humanis Berbasis Nilai Pancasila Dalam Rangka Revitalisasi Ideologi Di Aras Global,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 567–84; Ristina Yudhanti, “Pancasila

Dan Berbagai Permasalahan Aktual,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 599–610.

⁴³ Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), 25.

⁴⁴ Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia,” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (October 2, 2014): 227, <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.

bersedia mendengarkan pihak lain dengan penuh kesabaran, bahkan meskipun yang disampaikan tidak berkenan di hatinya.

Sila kelima Pancasila berbicara tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Di awal kemerdekaan Indonesia, Soekarno sangat kuatir bahwa demokrasi yang dikembangkan di Indonesia merdeka adalah sebuah demokrasi yang hanya menekankan “*politieke demoratie*” saja, tapi mengesampingkan dan mengorbankan “*sociale rechtvaardigheid*.” Demokrasi semacam itu memang akan menjamin terciptanya proses yang demokratis di dunia politik. Namun hasil dari percakapan politis yang demokratis semacam itu tidak serta merta melahirkan sebuah kesejahteraan sosial di masyarakat.⁴⁵ Kesetaraan politis harus diimbangi dengan kesetaraan ekonomik. Inilah yang disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan; sistem ekonomi yang dibuat sedemikian rupa demi menjamin terdistribusinya dengan adil segala macam *social goods* yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Kebajikan Kristiani yang selaras dengan esensi historis sila kelima adalah *empati*. Orang-orang Kristen perlu belajar memahami orang lain agar mengerti mengapa orang tersebut berkata, bertindak,

atau berperilaku demikian. Dalam 1 Korintus 9:20, firman Tuhan mengatakan,

Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.

Johan Galtung, pakar studi perdamaian internasional, mengingatkan bahwa perilaku (*behavior*) seseorang tidak pernah terjadi di ruang kosong. Perilaku seseorang senantiasa terkait erat dengan sikap (*attitude*) dan kontradiksi-kontradiksi (*contradictions*) yang menjadi konteks orang bersangkutan⁴⁶. Jika seseorang melakukan tindakan A terhadap orang lain, misalnya, maka tindakan tersebut pasti ada kaitannya dengan bagaimana orang tersebut memandang dan menilai orang lain. Inilah sikap. Dan perilaku serta sikap tersebut juga pasti terkait dengan kontradiksi-kontradiksi yang ada. Semakin besar kontradiksi-kontradiksi yang dihadapi oleh orang tersebut, maka makin besar pula resistensi orang tersebut terhadap orang lain yang dihadapinya. Jika orang tersebut merasa bahwa orang lain yang dihadapinya telah menghambat diri-

⁴⁵ Latif, *Negara Paripurna*, 528-548.

⁴⁶ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*

(London: Sage Publications, 1996), <https://doi.org/10.4135/9781446221631>.

nya untuk mencapai apa yang diinginkan-nya, maka kontradiksi akan menjadi besar. Lalu makin besar kontradiksinya, maka sikap orang tersebut juga makin negatif terhadap orang lain yang dihadapinya. Pada akhirnya, semakin negatif sikapnya terhadap si orang lain, maka semakin negatif pula perilakunya terhadap orang lain yang dihadapinya. Dan demikianlah, dimensi-dimensi sikap, perilaku, dan kontradiksi itu akan saling menguatkan satu sama lain, tak berkesudahan.

Di sinilah orang-orang Kristen perlu mengembangkan empati supaya bisa memahami mengapa seseorang berkata, bertindak, dan bertingkah-laku sebagaimana ia berkata, bertindak, dan bertingkah-laku. Sikap semacam itu akan menjauhkan orang-orang Kristen dari sikap menghakimi orang lain secara semena-mena. Dan jika empati ini bisa terjadi secara timbal balik, maka akan muncullah interpati, di mana semua pihak mengembangkan “*double vision*.” Jika masing-masing pihak memiliki “*double vision*,” maka semua pihak tidak akan saling menghakimi, menyerang, apalagi menyingkirkan. Sebaliknya, masing-masing pihak akan selalu berusaha melihat dan menilai situasi sesuai dengan perspektif orang lain yang dihadapinya. Dan, pada saat

yang sama, ia juga terbuka untuk mengundang orang lain tersebut untuk melihat situasi dari sudut pandan-nya.⁴⁷

Ketika berbicara tentang kepemimpinan, Yahya Wijaya mengusulkan supaya model kepemimpinan yang dikembangkan di gereja dan masyarakat adalah model kepemimpinan yang merdeka dan peduli. Ini bukan model kepemimpinan yang mengejar dan menekankan kekuasaan, entahkah kuasa tersebut didapat dari pejabat yang lebih tinggi, atau dilandaskan pada kharisma si pemimpin, ataupun kuasa yang didapat dari tradisi yang dianggap sakral oleh komunitas terkait. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang lahir dari kemerdekaan si pemimpin maupun yang dipimpinnya, dan yang senantiasa peduli pada orang lain, khususnya mereka yang menderita dan tertindas. Inilah model kepemimpinan yang sudah diteladankan oleh Yesus.⁴⁸

Untuk bisa mempraktikkan kepemimpinan semacam itu, maka dibutuhkan empati terhadap orang-orang lain. Ada kesengajaan yang dipraktikkan oleh semua elemen bangsa untuk saling memahami hidup dan penderitaan yang lain. Orang-orang tidak membiasakan diri melihat realita semata-mata dari sudut pandang

⁴⁷ Kreider, Kreider, and Widjaja, *A Culture of Peace*, 82-86.

⁴⁸ Yahya Wijaya, “Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja Masa Kini,”

Jurnal Jaffray 16, no. 2 (July 24, 2018): 129–44, <https://doi.org/10.25278/jj71.v16i2.287>.

dirinya dan kelompoknya sendiri saja, tapi juga dari sudut pandang orang lain, terutama mereka yang miskin dan menderita. Tanpa adanya kesengajaan semacam itu maka proses demokrasi di dunia politik tidak akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pewujudan keadilan sosial bahkan juga bermanfaat untuk menggeliatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini hanya bisa terjadi jika ada penciptaan kebijakan-kebijakan yang afirmatif pada kebutuhan kelompok miskin dan yang membutuhkan.⁴⁹

KESIMPULAN

Pancasila merupakan moralitas minimal yang dibutuhkan oleh semua kelompok masyarakat di Indonesia untuk solidaritas sosial dan kritik sosial. Sebagai moralitas minimal, maka nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan reiterasi, turunan, dari moralitas tebal yang dihidupi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Dan karena yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia adalah norma-norma agama dan kepercayaan disebabkan oleh sifatnya yang absolut, maka aktualisasi Pancasila harus dilakukan juga oleh komunitas-komunitas agama dan kepercayaan, termasuk oleh orang-orang Kristen. Esensi historis sila-sila Pancasila

bukanlah sesuatu yang asing dari apa yang diyakini serta dihidupi orang-orang Kristen. Sila-sila Pancasila mendapatkan resonansinya dalam kebajikan-kebajikan Kristiani yang spesifik, yaitu pengharapan, kerentanan, kerendahan-hati, kesabaran sepenanggungan, dan empati.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Anggi. "Pancasila dalam Perbuatan." *Media Indonesia*, October 9, 2019. <https://media.indonesia.com/read/detail/264186-pancasila-dalam-perbuatan>.
- Angkasa, Ig. Kingkin Teja. "Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila." *Kompas.com*, June 12, 2010. <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/12/06/09044572/Pendidikan.Karakter.Berbasis.Pancasila>.
- Azra, Azyumardi. "Kegalauan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (July 5, 2012): 1-12-12. <https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9656>.
- Baidhowi. "Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila." *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 497-516.
- Chang, William. *Menggali Butir-Butir Keutamaan*. Penerbit Kanisius, 2002.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila: Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.

⁴⁹ Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia," *Humaniora* 5, no. 1

(April 1, 2014): 107-12, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>.

- Dewangga, Thanon Aria. "Pendidikan Karakter Untuk Membangun Manusia Indonesia Yang Unggul." *Pendidikan Karakter Untuk Membangun Manusia Indonesia Yang Unggul* (blog), December 21, 2012. <http://deaneducation.blogspot.com/2012/12/pendidikan-karakter-untuk-membangun.html>.
- Entah, Aloysius R. "Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila." *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 533–42.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications, 1996. <https://doi.org/10.4135/9781446221631>.
- Halim, Al. "Posisi Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat." *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 517–32.
- Herutomo, Bambang. "Nilai-nilai Pancasila Tidak Bertentangan dengan Iman Kristen." *Kompasiana*, November 21, 2018. <https://www.kompasiana.com/bambangherut0m0b711/5bf5868712ae9472b10cf207/nilai-nilai-pancasila-tidak-bertentangan-dengan-iman-kristen>.
- Kamim, Anggalih Bayu Muh. "Pancasila Sebagai Payung Pendidikan Inter-religius, Upaya Untuk Mengatasi Radikalisme Agama Di Indonesia." *Menara Ilmu Pancasila*, Fakultas Filsafat UGM. Accessed January 22, 2020. https://drive.google.com/file/d/0B5oYZGP7oYzjVEF2eUdSRkxYeW8/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.
- Kreider, Alan, Eleanor Kreider, and Paulus Widjaja. *A Culture of Peace: God's Vision for the Church*. Intercourse, PA: Good Books, 2005.
- Kustiasih, Rini. "Kemanusiaan Lahirkan Politik Emansipatoris." *Kompas.Id*, January 9, 2020. <https://kompas.id/baca/utama/2020/01/09/kemanusiaan-lahirkan-politik-emansipatoris/>.
- Latif, Martitah. "Reaktualisasi Ideologi Pancasila Dalam Semangat Pembentukan Hukum Yang Bermoral." *Law Research Review Quarterly* 2, no. 01 (2016): 79–92. <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21404>.
- Latif, Yudi. "Memanjurkan Pancasila." *Kompas.Id*, May 31, 2019. <https://kompas.id/baca/opini/2019/05/31/memanjurkan-pancasila/>.
- . "Menghidupkan Semangat Pancasila." *Media Indonesia*, May 29, 2017. <https://mediaindonesia.com/read/detail/106569-menghidupkan-semangat-pancasila>.
- . *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- . "Pancasila Sebagai Titik Temu." *Libianko Sianturi*. Accessed January 23, 2020. <https://www.facebook.com/1753567298058416/post/s/pancasila-sebagai-titik-temuyudilatifcendekiawanmedia-indonesia-31-mei-2019pada/2309013885847085/>.
- Lederach, John Paul. *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. Reprint edition. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Mangesti, Yovta Arie. "Hukum Humanis Berbasis Nilai Pancasila Dalam Rangka Revitalisasi Ideologi Di Aras Global." *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 567–84.
- Mojau, Julianus. "Identitas-Identitas Teologis Kristen Protestan Indonesia Pasca Orde Baru: Sebuah Pemetaan Awal." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi*

- Kontekstual dan Filsafat Keilahian 2, no. 2 (October 30, 2017): 109–26. <https://doi.org/10.21460/gema.2017.22.290>.
- Mustansyir, Rizal. “Pancasila Sebagai Sumber Kecerdasan Ideologis Bangsa Indonesia.” *Menara Ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat UGM*, 2015. https://drive.google.com/file/d/0B5oYZGP7oYzjb05xNjhaSDVyWW8/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.
- Nastiti, Aulia, and Sari Ratri. “Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia.” *Contemporary Southeast Asia, ISEAS @ 50 Special Issue: Young Scholars in Southeast Asian Studies*, 40, no. 2 (August 2018): 196–221.
- Ngelow, Zakaria J. “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (October 2, 2014): 213–34. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.
- Nugroho, Hastanti Widy. “Etika Keutamaan Dalam Nilai-Nilai Pancasila.” *Menara Ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat UGM*. Accessed January 22, 2020. https://drive.google.com/file/d/0B35udyIfjcr4d0lncDFrODcteDg/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.
- Pattipeilohy, Stella Yessy Exlentya. “Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila Sebagai Model Interkulturalitas.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 3, no. 2 (October 26, 2018): 121–46. <https://doi.org/10.21460/gema.2018.32.363>.
- Rubiyo. “Restorasi Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa.” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 19–30.
- Samho, Bartolomeus, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, and Andreas Doweng Bolo. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Edited by Lani Dwikoratno. Yogyakarta: Kanisius, 2012. repository.unpar.ac.id/handle/123456789/1671.
- Sastroatmodjo, Sudjijono. “Membumikan Pancasila Sebagai Pola Perilaku Melalui Gerakan Bersama Pendidikan.” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 627–40.
- Siregar, Christian. “Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia.” *Humaniora* 5, no. 1 (April 1, 2014): 107–12. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>.
- Syamsuddin, M. Mukhtasar. “Redefining The Position Of Pancasila As Indonesian Philosophy In The Era Of Globalization.” *Menara Ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat UGM*, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B0mBqI08o3d9S0lyMU44UFN4eFU/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.
- Walzer, Michael. *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*. 1st Edition. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2019.
- Widjaja, Paulus S. *Character Formation and Social Transformation: An Appeal to The Indonesian Churches Amidst the So-Called Chinese Problem*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010.
- . “Membangun Teologi Politis di Indonesia (dari Teologi Sukses ke Politik Pelayanan dan Doksologi).” *Gema Teologi*, no. 59 (October 30, 2006). <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/236>
- Widjojo, Agus. “Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional

- Dalam Aras Global.” *Law Research Review Quarterly* 3, no. 1 (2016): 5–18.
- Wijaya, Yahya. “Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja Masa Kini.” *Jurnal Jaffray* 16, no. 2 (July 24, 2018): 129–44. <https://doi.org/10.25278/jj71.v16i2.287>.
- Yudhanti, Ristina. “Pancasila Dan Berbagai Permasalahan Aktual.” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 1 (2016): 599–610.
- Yudistira. “Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa.” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 01 (2016): 421–36. <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21325>